PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jl. Jemur Andayani No.1 Telp. (031) 8477551, 8476818, Fax. (031) 8477404
Website : bkd.jatimprov.go.id Email :bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Surabaya, 7 Agustus 2024

Nomor : 800/ 5922 /204.5/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Edaran Tindak Lanjut Penyusunan SKJ

Kepada
Yth. Sdr.
1. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.

di
T E M P A T

Dalam rangka percepatan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan menindaklanjuti hasil perumusan Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui SIMASTER maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perumusan Standar Kompetensi Jabatan difokuskan pada kompetensi teknis jabatan manajerial JPT, Administrator dan Pengawas;
2. Perumusan Standar Kompetensi Jabatan Teknis menggunakan kerangka berpikir dengan perspektif *Balance Scorecard* empat perspektif (layanan, proses bisnis, pengembangan SDM dan anggaran) kemudian menyesuaikan objek kerja sesuai dengan tugas Jabatan sebagaimana contoh terlampir;
3. Keputusan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan yang sudah ditetapkan untuk saat ini dapat digunakan sebagai acuan pada Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural;
4. Perangkat Daerah menginput dan mereview kembali masing-masing persyaratan jabatan manajerial (kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi teknis dan uraian tugas jabatan);
5. Paling lambat perumusan Standar Kompetensi Jabatan Manajerial Perangkat Daerah melalui SIMASTER pada Kamis, 15 Agustus 2024 dan akan ditutup akses nya pada pukul 17.00 WIB yang kemudian akan dilakukan validasi awal;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

6. Evaluasi Standar Kompetensi Jabatan akan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Agustus setelah dilakukan verifikasi dan validasi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

ditandatangani secara elektronik
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

REKAP HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENYUSUNAN DAN PENGISIAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PER RABU, 7 AGUSTUS 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRES CAPAIAN
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	LENGKAP
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BELUM
3	BADAN KOORDINASI WILAYAH BOJONEGORO	BELUM
4	BADAN KOORDINASI WILAYAH JEMBER	KURANG
5	BADAN KOORDINASI WILAYAH MADIUN	BELUM
6	BADAN KOORDINASI WILAYAH MALANG	BELUM
7	BADAN KOORDINASI WILAYAH PAMEKASAN	BELUM
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BELUM
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	BELUM
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	KURANG
11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BELUM
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KURANG
13	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	BELUM
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BELUM
15	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KURANG
16	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	BELUM
17	BIRO HUKUM	BELUM
18	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BELUM
19	BIRO ORGANISASI	KURANG
20	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	BELUM
21	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	BELUM
22	BIRO PEREKONOMIAN	BELUM
23	BIRO UMUM	BELUM
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KURANG
25	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	KURANG
26	DINAS KEHUTANAN	LENGKAP
27	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KURANG
28	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	BELUM
29	DINAS KESEHATAN	BELUM
30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KURANG
31	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	BELUM
32	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	BELUM
33	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	LENGKAP
34	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	BELUM
35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BELUM

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRES CAPAIAN
36	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN	**BELUM**
37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	**BELUM**
38	DINAS PENDIDIKAN	**BELUM**
39	DINAS PERHUBUNGAN	**KURANG**
40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	**LENGKAP**
41	DINAS PERKEBUNAN	**LENGKAP**
42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	**BELUM**
43	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	**BELUM**
44	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	**KURANG**
45	DINAS PETERNAKAN	**BELUM**
46	DINAS SOSIAL	**KURANG**
47	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	**BELUM**
48	INSPEKTORAT PROVINSI	**BELUM**
49	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	**BELUM**
50	SEKRETARIAT DPRD	**KURANG**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

CONTOH PERUMUSAN SKJ KOMPETENSI TEKNIS
BRIDA DENGAN MODEL BSC

Jabatan	Deskripsi	Indikator
JPT	Menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan di bidang penelitian dan inovasi daerah	1. Mampu meyelenggarakan layanan dibidang penelitian dan inovasi daerah 2. Mampu menyelenggarakan reformasi birokrasi dibidang penelitian dan inovasi daerah 3. Mampu menyelenggarakan akuntabilitas kinerja dibidang penelitian dan inovasi daerah 4. Mampu menyelenggarakan pengelolaan anggaran dibidang penelitian dan inovasi daerah
Sekretaris	Melaksanakan dan merumuskan kebijakan di bidang kesekretariatan	1. Mampu melaksanakan layanan dibidang kesekretariatan 2. Mampu melaksanakan reformasi birokrasi dibidang kesekretariatan 3. Mampu melaksanakan akuntabilitas kinerja dibidang kesekretariatan 4. Mampu melaksanakan pengelolaan anggaran dibidang kesekretariatan
KTU	Memproses dan menyusun kebijakan di bidang ketatausahaan dan kepegawaian	1. Mampu memproses layanan dibidang ketatausahaan dan kepegawaian 2. Mampu memproses reformasi birokrasi dibidang ketatausahaan dan kepegawaian 3. Mampu memproses akuntabilitas kinerja dibidang ketatausahaan dan kepegawaian 4. Mampu memproses pengelolaan anggaran dibidang ketatausahaan dan kepegawaian
Kabid Inovasi dan teknologi	Melaksanakan dan merumuskan kebijakan di bidang inovasi dan teknologi	1. Mampu melaksanakan layanan dibidang inovasi dan teknologi 2. Mampu melaksanakan reformasi birokrasi dibidang inovasi dan teknologi 3. Mampu melaksanakan akuntabilitas kinerja dibidang inovasi dan teknologi 4. Mampu melaksanakan pengelolaan anggaran dibidang inovasi dan teknologi

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik